

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu perkembangan dari dunia ekonomi politik internasional paska Perang Dunia II adalah kemunculan perusahaan multinasional (*Multinational Corporation*). *Multinational Corporation* adalah entitas berwujud yang dalam beberapa hal akan berdampak pada negara asal atau di mana markas besarnya berada. Meskipun sebuah perusahaan mungkin menunjuk negara dengan hak bebas pajak sebagai tempat penggabungan resminya, secara praktis kantor pusat atau negara asal adalah tempat kantor manajemen puncak berada. Dalam kebanyakan kasus, ini juga merupakan negara di mana perusahaan memulai dan di mana persentase pemegang saham terbesar berada.¹

Berbicara mengenai *Multinational Corporation*, salah satu sifat yang tidak asing dari mereka adalah *Market-Seeking Investment*. *Market-Seeking Investment* adalah motivasi yang berasal dari keinginan investor untuk melayani domestic atau pasar regional.² Yang dimana hal itu berarti suatu perusahaan bergerak atau beroperasi di luar negeri dengan saham yang terdiri dari beberapa negara. Kemampuan yang mereka gunakan untuk dapat mendirikan anak

¹ Stephen D. Cohen, *Multinational Corporations and Foreign Direct Investment*, Oxford University Press, 2007, hal 36.

² Cecile Fruman, "Why does efficiency-seeking FDI matter?" diakses dari <http://blogs.worldbank.org/psd/why-does-efficiency-seeking-fdi-matter> pada tanggal 10 November 2017 pukul 11:01

perusahaan diluar negeri lebih dikenal dengan *host country*.

Di era industrialisasi negara membutuhkan yang namanya investasi dari sebuah MNC. MNC ini memberikan manfaat yakni kesejahteraan dan pekerjaan di seluruh dunia. Mereka menciptakan lapangan kerja dan membantu meningkatkan harapan bagi siapapun yang membutuhkan.³ Perusahaan multinasional juga berkaitan erat dengan *FDI (Foreign Direct Investment)* yang didefinisikan sebagai sebuah proses dalam melakukan investasi ke luar negeri. Dalam hal ini, perusahaan multinasional membangun anak perusahaan mereka di negara lain yang menjadi tujuan ekspor untuk mempermudah kegiatan ekspor-impor dan juga menghemat biaya. Ada beberapa kondisi mengapa sebuah perusahaan multinasional melakukan *FDI* ke negara tujuan ekspor agar dapat menghemat biaya transportasi dan dapat mempekerjakan penduduk lokal, tetapi dibalik itu semua ada juga hambatan dari pemerintah negara tujuan ekspor.⁴

Menurut data dari *UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development)* yang merupakan organisasi internasional dalam menangani isu perdagangan, investasi dan pembangunan pada tahun 2008, telah terdapat 78.000 lebih perusahaan yang ada di dunia naik sangat drastis dari tahun ke

³ Tejvan Pettinger, "Multinational Corporations: Good or Bad?"

diakses dari

<https://www.economicshelp.org/blog/538/economics/multinationa-l-corporations-good-or-bad/> pada tanggal 10 November 2017 pukul 11:15

⁴ Binus University, "Pengertian FDI" diakses dari

<https://sbm.binus.ac.id/2016/11/15/pengertian-fdi/> pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 17:22

tahun. Jumlah investasi dunia yang ditanamkan oleh perusahaan multinasional yaitu 1.3 Triliun Dolar Amerika, jumlah ini dapat dikatakan sangat besar dari investasi mayoritas terdapat di negara maju, dengan jumlah 66% dan 32% ditanamkan pada wilayah negara berkembang.⁵

Indonesia sangat membutuhkan investasi besar untuk menggenjot perekonomian domestik agar menjadi lebih baik lagi. Karena alasan tersebut Indonesia sangat membutuhkan investor asing yang ingin menanamkan modalnya di dalam negeri. Indonesia saat ini tidak bisa hanya bergantung pada konsumsi rumah tangga di tengah daya beli masyarakat yang cenderung masih melemah. Terlebih lagi saat kondisi neraca dagang Indonesia terutama ekspor yang masih harus mengalami tren kontraksi.⁶ Salah satu investor yang melakukan investasi di Indonesia adalah Nike Inc. Perusahaan Nike ini berdiri pada tanggal 8 September 1969 dan bergerak di bidang desain, pengembangan, pemasaran dan penjualan alat-alat olahraga. Perusahaan ini beroperasi di Amerika Utara, Eropa, Tiongkok, Jepang, dan terus memperluas pasarnya.⁷ Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat didampingi Dirjen Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi, Budi Darmadi dan Ses Ditjen *Building Information Modelling* Setio Hartono menerima kunjungan Presiden Direktur PT Nike Indonesia Mr. Jeff Perkins di Kementerian Perindustrian Jakarta pada 8 April 2013 guna

⁵ Martin Wolf, "Why Globalization Works" Yale University Press, 2005, hal 232.

⁶ <https://ekbis.sindonews.com/read/1089852/34/menko-darmin-beberkan-alasan-kenapa-ri-butuh-investor-asing-1456916543> diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 11:28

⁷ <https://www.reuters.com/finance/stocks/company-profile/NKE.N> diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 11:38

membahas rencana investasi dan menjadikan Indonesia sebagai basis produksi Nike terbesar di dunia.⁸

Di akhir tahun 1980, Indonesia melakukan pembukaan sektor ekonomi yang lebih besar menuju persaingan yang lebih baik. Mereka menghilangkan penghalang yang besar dalam hal perdagangan dan industrialisasi. Mereka membongkar monopoli dan menstimulasi persaingan di dalam ekonomi global. Hubungan antara kedua belah pihak merupakan pengalaman yang saling menguntungkan karena Indonesia telah mendapatkan banyak manfaat dari hubungannya dengan Nike. Indonesia juga berhasil memperluas pangsa industri manufaktur kelas dunia untuk ekonomi internasional. Pabrik Nike di Indonesia pun dijadikan komponen kebijakan nasional yang lebih terbuka sehingga dapat menciptakan lapangan kerja. Pabrik mereka berlokasi di daerah pedesaan sehingga mereka dapat membantu menyelamatkan ribuan keluarga dari kemiskinan yang berakibat kekurangan gizi serta buta huruf terhadap anak-anak mereka.⁹

Nike Inc mulai mengawali investasinya di negara Jepang yakni pada tahun 1963. Setelah menyelesaikan kesepakatan dengan Onitsuka, mereka mengguncang rincian kemitraan pada tanggal 25 Januari 1964, menciptakan Blue Ribbon Sports dengan investasi masing-masing \$ 500. Meskipun Nike belum berdiri sendiri sebagai satu perusahaan yang utuh namun sudah dapat dikatakan mereka melakukan pencarian pasar dan melakukan sebuah investasi yang

⁸ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6098/Investasi-Nike-Diarahkan-ke-Luar-Jabodetabek> diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 11:40

⁹ <http://www.philstar.com/business/2013/04/17/931434/nike-indonesia-employing-more-hundred-thousand-workers> diakses pada tanggal 18 Desember 2017 pukul 18.51

mengawali perkembangan Nike hingga saat ini. Perusahaan Nike yang kita kenal sekarang hanya berawal dari perusahaan kecil dengan nilai investasi sebanyak USD 500.¹⁰ Selama berinvestasi di Indonesia, Nike pun menjalin banyak kerjasama dengan industri lokal. Bahkan sudah ada 38 perusahaan manufaktur yang termasuk industri alas kaki khususnya sepatu sport di Indonesia dengan jumlah karyawan yang dipekerjakan mencapai 175.000 orang. Diakhir pertemuan, Jeff Perkins menyatakan bahwa Nike sangat berkomitmen menambah investasinya di Indonesia.¹¹ Beberapa perusahaan menggunakan insentif untuk membuat karyawan melakukan apa yang mereka inginkan seperti memberi bonus dan makanan gratis, misalnya. Namun, menurut laporan Bonnie Kavoussi, sebuah kontraktor Nike di Indonesia diduga melakukan tindakan ekstrem untuk membawa beberapa buruhnya ikut dengan peraturan mereka. Laporan tersebut mengklaim sebuah pabrik sepatu di Sukabumi, Indonesia, yang memproduksi produk Nike yang diduga mempekerjakan perwira tinggi militer Indonesia untuk memaksa buruh menyetujui pekerjaan yang diupah kurang dari upah minimum negara tersebut yang baru saja naik. Perwira militer tersebut diduga mengintimidasi pekerja yang enggan menandatangani sebuah petisi yang mengatakan bahwa kontraktor Nike tidak harus membayar upah minimum yang baru.¹²

¹⁰ <http://www.todayifoundout.com/index.php/2014/07/history-nike/> diakses pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 18:32

¹¹ <http://www.kemenperin.go.id/artikel/6098/Investasi-Nike-Diarahkan-ke-Luar-Jabodetabek> diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 11:40

¹² Bonnie Kavoussi, "Nike Factory In Indonesia Used Military To Intimidate Workers Into Giving Up Pay" diakses dari <https://www.huffingtonpost.com/2013/01/15/nike->

Kondisi kerja yang kurang baik di Nike Inc ini telah hadir terlalu lama tanpa pernah disadari keberadaannya. Hal ini dibuktikan dengan sering munculnya kejadian yang meyakinkan publik agar melakukan demonstrasi terhadap hak-hak pekerja terutama di negara-negara dunia ketiga yang miskin dan sangat jauh dari kebenaran. Perusahaan besar dari Amerika Serikat ini telah memindahkan sebagian besar pabrik mereka ke luar negeri untuk menghindari peraturan kerja yang ketat di Amerika Serikat. Negara-negara dunia ketiga seperti Vietnam, China, Korea Selatan, dan Taiwan menyediakan akses langsung ke tenaga kerja dengan upah yang murah dan sangat mudah untuk didapat. Perusahaan-perusahaan ini sekarang bisa menuai keuntungan dengan mempertahankan biaya produksi yang sangat rendah. Media telah memberikan informasi kepada publik bahwa akhir-akhir ini banyak perusahaan yang melakukan tindakan malpraktek, khususnya kepada buruhnya. Tidak ada korporasi yang mendapat kritik seperti Nike Inc. Hal ini digambarkan dengan kondisi di anak perusahaan beberapa area pabrik Nike yang berada di luar negeri ditemukan bahwa perlu adanya pencapaian standar minimal untuk semua pekerja. Perlu diketahui juga bahwa perusahaan Nike Inc ini mengeksploitasi pekerja di Asia untuk keuntungan finansial. Selama beberapa tahun hanya beberapa informasi miring saja yang didapatkan, namun ketika ada kabar terkait eksploitasi buruh banyak diketahui

perusahaan Nike Inc ini pun diserang tak henti-hentinya.¹³

Berdasarkan sumber yang didapatkan dari sebuah artikel di *World Socialist Web Site* yang berjudul “*Nike faces allegations of worker abuse in Indonesia*” oleh John Braddock, bahwa buruh Nike di Indonesia rata-rata hanya mendapatkan upah minimum USD 2.50 per hari. Seharusnya para buruh menerima upah untuk kehidupan sehari-hari diantara USD 4.00 – USD 4.50.¹⁴ Nominal tersebut sangat jauh untuk hidup dengan layak dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan Jim Keady and Leslie Kretzu yang berasal dari *Educating for Justice* pernah mencoba untuk hidup menjadi buruh Nike di Indonesia. Mereka tinggal bersama buruh pabrik untuk memahami kenyataan yang sesungguhnya dan bukan hanya untuk sekedar penelitian. Mereka tinggal di Tangerang, Indonesia selama satu bulan. Selama satu bulan itu, mereka bertahan hidup dengan upah USD 1,25 per hari yang merupakan upah dasar tertinggi yang disediakan oleh Nike kepada pekerjanya.¹⁵ Dengan upah dibawah minimum yang didapatkan maka buruh sangat sulit untuk bertindak lebih leluasa karena adanya beberapa aturan yang diterapkan bagi para buruh juga, yakni :

1. Perusahaan tidak memfasilitasi para pekerja ketika ingin berorganisasi melalui serikat pekerja.

13

https://web.stanford.edu/class/e297c/trade_environment/wheeling/hnike.htm diakses pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 20:27

¹⁴ John Braddock, “*Nike faces allegations of worker abuse in Indonesia*” diakses dari

<https://www.wsws.org/en/articles/2011/09/nike-s08.html> pada tanggal 10 November 2017 pukul 21:07

¹⁵ <http://www.microrevolt.org/interviews/080504.htm> diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 21:11

2. Perusahaan tidak memotivasi pekerja untuk bekerja dengan baik, melainkan lebih cenderung mengancam mereka.
3. Perusahaan tidak pernah menanggapi keluhan dan aspirasi para pekerja
4. Perusahaan akan memberi hukuman jika pekerja menolak lembur.¹⁶

Dari beberapa penjelasan di atas bahwa hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM tersebut termasuk dalam kategori kejahatan melawan kemanusiaan atau *crime against humanity*. Kejahatan ini bisa berupa pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran, dan lain sebagainya.¹⁷

Upah merupakan hal krusial dalam bekerja karena merupakan penghargaan dari hasil pencapaian kerja. Upah juga menjadi persoalan yang mendasar dalam hal ketenagakerjaan dan industrial di Indonesia dikarenakan adanya ketidakpuasan buruh atas upah yang mereka terima. Adapun seharusnya MNC dan pemerintah dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pemerintah seharusnya menitikberatkan dalam menciptakan iklim yang bersahabat untuk menarik masuknya MNC ke dalam negeri. Hal ini dimaksudkan agar pemerintah tetap dapat melakukan kontrol pada setiap MNC yang beroperasi dinegaranya, sekaligus tetap memperoleh pemasukan berupa modal luar negeri. Pemerintah negara penerima juga, harus melakukan aktifitas untuk

¹⁶ <https://www.coursehero.com/file/p277ucp/Adanya-beberapa-sikap-negatif-di-antara-karyawan-atau-bahkan-manajer-di-tempat/> diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 21:31

¹⁷ <https://www.merdeka.com/pendidikan/ngeri-inilah-4-kategori-kasus-pelanggaran-ham-internasional.html> diakses pada tanggal 10 November 2017 pukul 21:57

menciptakan keseimbangan anggaran belanja, restriksi perdagangan, dan merancang perencanaan ekonomi dengan baik untuk menghindari munculnya ketergantungan negara pada MNC sehingga apa yang ditakutkan kaum Marxist, yaitu bahwa keberadaan MNC akan menimbulkan eksploitasi pada negara penerima dapat dihindari.¹⁸ Eksploitasi yang dimaksud seperti kasus yang terjadi antara Nike dengan buruh pabrik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang penulis rumuskan adalah:

“ Bagaimana kolaborasi Nike Inc dan pemerintah dalam mengendalikan kaum buruh Nike di Indonesia ?”

C. Kerangka Konseptual

1. Konsep Hegemoni

Pada awalnya, hegemoni ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu (bahasa Yunani: ἡγεμονία *hēgemonía*) yang mempunyai arti memimpin. Seperti yang dikemukakan dalam Ensiklopedia Britanica, dalam prakteknya di Yunani hegemoni ini menunjukkan dominasi posisi yang diklaim oleh negara-negara kota (*polism atau citystates*) secara individual.¹⁹ Namun menurut Roger Simon hegemoni itu bukanlah hubungan yang didominasi dengan menggunakan

¹⁸ “Multinational Corporations and Economic Development: The Lessons of Singapore” oleh Ali M. Nizamuddin, dalam *International Social Science Review*.

¹⁹ Heru Hendarto, “Mengenai Konsep Hegemoni Gramsci, dalam *diskursus Kemasyarakatan Dan Kemanusiaan*”, Jakarta: Gramedia, 1993, hal 73

kekuasaan, tetapi hubungan yang memiliki persetujuan dengan menggunakan kepemimpinan politik dan ideologis atau bahasa sederhananya bisa dikatakan hegemoni itu merupakan suatu organisasi konsensus.²⁰ Hegemoni ini sendiri merupakan hubungan antara kelas dengan kekuatan sosial lain, yang dimana kelas hegemonik ini mendapatkan persetujuan dari kelas sosial lain dengan menciptakan dan mempertahankan sistem aliansi melalui perjuangan politik serta ideologis.²¹

Pada titik awalnya, Antonio Gramsci ini mengatakan bahwa konsep hegemoni ini adalah suatu kelas yang dimana anggotanya menjalankan sebuah kekuasaan terhadap kelas-kelas yang berada dibawahnya dengan cara yang tidak wajar. Bahkan dalam catatannya terhadap karya Machiavelli yaitu "*The Prince*", Gramsci menggunakan centaur mitologi Yunani yaitu setengah binatang dan setengah manusia, yang dimana hal tersebut menjadi simbol dari perspektif ganda dari suatu tindakan politik yang memiliki kekuatan, otoritas, hegemoni, serta kekerasan dan kesopanan. Gramsci disini mengartikan hegemoni berbeda dengan pengertian secara umumnya, di tempat tinggalnya banyak terjadi dominasi besar-besaran yang dimana pemerintah menggunakan konsensus pemerintah dengan rakyatnya, dari situlah muncul sebuah hegemoni dari Gramsci. Gramsci juga memaparkan bahwa hegemoni ini merupakan sebuah proses kelas dominan menguasai kelas bawah dan kelas bawah ikut turut serta mendukung kelas dominan.

²⁰ Roger Simon, "Gagasan-gagasan Politik Gramsci", Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist, 1999, hal. 19-20

²¹ *Ibid* hal. 22

Dalam hal ini, bentuk penguasaannya dilakukan melalui persetujuan masyarakat.²²

Berawal dari mencari sebuah pola dalam kelas sosial baru yang saat itu Gramsci lebih banyak melihat fenomena pada sejarah gereja Roma.²³ Seperti yang Gramsci tulis dalam bukunya yang berjudul *Selections from the Prison Notebooks* dikatakan :

“... and this presupposes the attainment of a “cultural-social” unity through which a multiplicity of dispersed wills, with heterogeneous aims, are welded together with a single aim, on the basis of an equal and common conception of the world..”²⁴

Dengan pernyataan Gramsci itu, dapat dikatakan bahwa untuk mempertahankan kekuasaan, kelas dominan harus membuat kesatuan sosial budaya di mana-mana agar keinginan dengan tujuan yang berbeda-beda dapat terjalin menjadi tujuan utama yang dijadikan dasar bagi konsepsi umum mengenai dunia. Hegemoni ini merupakan sebuah rantai kemenangan yang didapat melalui mekanisme konsensus yang dimana mekanisme ini merupakan sebuah kesepakatan yang disetujui bersama-sama antar kelompok atau individu daripada melalui penindasan terhadap kelas

²² *Ibid*

²³ Agus Afandi, “Belunggu Budaya Santetan Di Desa Randu Alas Kecamatan Kare Kabupaten Madiun (Analisis Teori Hegemoni Antonio Gramsci)”, Jurnal Transformasi Lpm lain Mataram (Volume, 7, No. 1 Januari-Juni 2011), Hal. 4-5

²⁴ Antonio Gramsci, “Selections from Prison Notebooks”, Lawrence & Wishart, 1971, hal 349

sosial lainnya.²⁵ Hegemoni juga merujuk pada kedudukan ideologi satu atau lebih kelompok atau kelas dalam masyarakat sipil yang lebih tinggi dari lainnya.²⁶ Dalam pandangan Gramsci negara tidak lagi dilihat sebagai alat kekuatan dari sebuah kelas (seperti yang dikembangkan oleh Marx, Engels dan Lenin), tetapi sebagai semua jenis kegiatan dalam seluruh jangkauan tempat di mana hubungan produksi sosial mampu direproduksi.²⁷ Adapun tiga tahapan perkembangan politik yang dilalui oleh kelompok social agar mereka dapat mengembangkan gerakan perubahan yaitu²⁸ :

1. Tahapan pertama disebut korporat-ekonomis. Yang dimana seorang korporatis adalah individu yang mementingkan kepentingannya sendiri. Melalui hal tersebut, seseorang berafiliasi menjadi tahap korporat-ekonomis agar mereka mendapatkan dukungan orang lain untuk memperoleh keamanan mereka sendiri.
2. Tahapan kedua terjadi ketika para anggota-anggota kelompok korporat ini menyadari bahwa ada beberapa wilayah kepentingan yang lebih luas dan dalam hal tersebut mereka harus membagi kepentingan mereka untuk orang lain demi masa depan yang terjangkau

²⁵ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/consensus>

diakses pada tanggal 13 Desember 2017 pukul 19:38

²⁶ Nezar Patria dan Andi Arief. "Antonio Gramsci: Negara dan Hegemoni". Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, Hal. 119

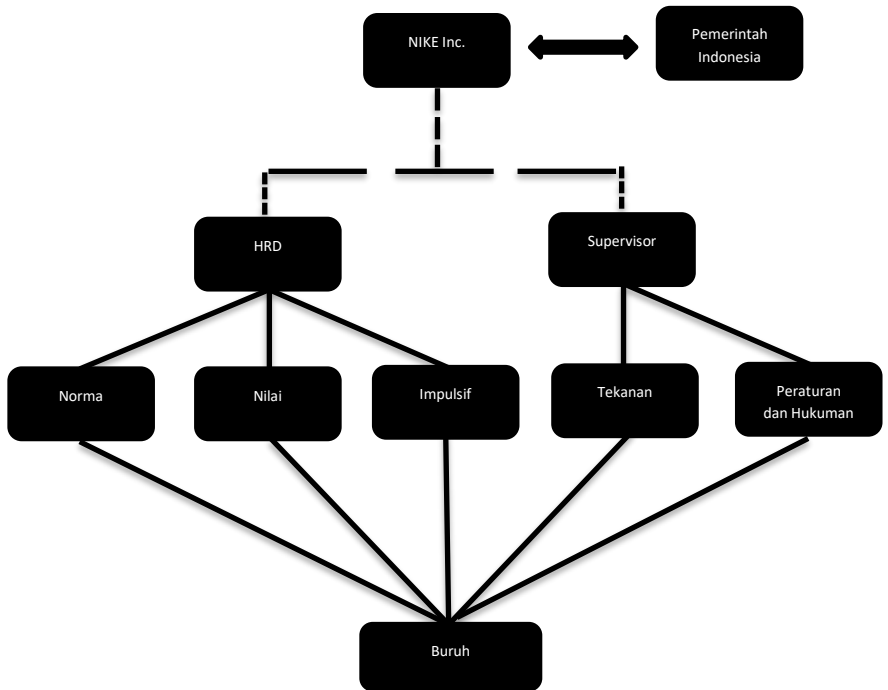
²⁷ *Ibid* hal 12

²⁸ Trent Brown, "Gramsci dan Hegemoni" dari <http://links.org.au/node/1351> diakses pada tanggal 27 oktober 2017 pukul 20.15

3. Tahapan hegemoni yang dicapai dengan tahapan nasional kerakyatan. Dalam tahapan ini suatu kelas melampaui batas-batas korporasi kelas yang bersifat murni ekonomi. Dalam tahapan ini, kelas sudah memikirkan suatu gerakan atau perjuangan politik.

Berdasarkan teori hegemoni yang diajukan oleh Gramsci diatas, kolaborasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah menjalankan konsep hegemoni. *Pertama*, Nike Inc yang bersifat korporat-ekonomis mulai menyadari bahwa tidak bisa untuk berjalan sendiri. Mereka membutuhkan yang namanya dukungan atau telah berafiliasi dengan Indonesia untuk memperoleh keamanan mereka sendiri. *Kedua*, Nike Inc dan Indonesia mulai menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar bisnis melainkan harus terus membagi kepentingannya untuk masa depan yang terjangkau. *Ketiga*, tahap yang terakhir adalah bahwa perkembangan hegemoni secara terus menerus akan menciptakan kebiasaan yang sudah melewati batas. Disini mulai timbul pemberontakan yang bersifat politik guna menuntut keadilan disebabkan hegemoni yang semakin agresif.

Untuk mengendalikan kaum buruh Nike yang akan memberontak menuntut hak-nya, Nike dan pemerintah Indonesia berkolaborasi agar objek hegemoni yaitu buruh dapat dikendalikan. Ketika proses hegemoni telah berhasil diterapkan kepada kaum buruh Nike, maka objek hegemoni telah berhasil dikendalikan. Pada tahapan proses hegemoni inilah dapat dipahami bahwa untuk melakukan sebuah hegemoni haruslah mencakup sebuah variabel penting. Sebagai ilustrasinya, proses hegemoni tersebut dapat digambarkan seperti dibawah ini :



Human Resource Development berfungsi:

1. Bekerjasama dengan pemerintah untuk memberikan pelatihan
2. Mentransfer nilai dan norma perusahaan kepada para buruh
3. Memberikan peluang kerja kepada para buruh pendaatang

Supervisor berfungsi:

1. Menyusun tim, mengatur, dan melaksanakan proyek agar sesuai dengan timeline
2. Memberikan penjelasan terkait dengan aturan dan hukuman dari perusahaan

D. Argumen Penelitian

Riset ini akan menjelaskan bahwa kolaborasi negara dan MNCs menjadikan buruh pabrik Nike Inc menjadi objek hegemoni. Dalam hal ini, negara lebih berpihak dan lebih mendukung Nike Inc, sehingga perusahaan tersebut memiliki kekuatan untuk mengendalikan buruh pabrik. Pengendalian korporasi (Nike Inc) terhadap kaum buruh sejalan dengan kolaborasi yang dilakukan oleh negara dan MNCs. Dengan adanya hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hegemoni terjadi ketika Nike Inc mampu mengendalikan buruhnya.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kolaborasi MNCs dan Indonesia dalam mengendalikan kaum buruh pabriknya terutama di Negara Sedang Berkembang seperti Indonesia ini.
2. Untuk mengetahui mengapa Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap MNCs yang pada dasarnya eksploitatif (pendayagunaan)
3. Untuk membuktikan bahwa MNCs beserta intelektual organiknya menjadikan kaum buruh sebagai objek dari hegemoni mereka yang sesuai dengan pemikiran dari Antonio Gramsci terutama dalam ekspansinya di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam proposal skripsi ini menggunakan teknik pengumpulan data studi literatur/studi pustaka. Data skripsi ini disusun melalui metode kualitatif dengan menghimpun berbagai sumber literatur. Data yang di dapat berasal dari sumber kepustakaan seperti buku-buku terkait dan jurnal ilmiah serta berita media masa seperti koran, majalah, media online, dan artikel.

G. Jangkauan Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menentukan jangkauan penelitian pada tahun 2000an, dimana pada saat itu mulai muncul konflik eksploitasi terhadap kaum buruh Nike terutama di Negara Sedang Berkembang yaitu di Indonesia mulai mencuat ke dunia internasional.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : berisi mengenai alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, argumentasi penelitian, metode penelitian, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan karena bagian ini merupakan dasar atau kerangka pemikiran untuk menentukan langkah selanjutnya dalam penulisan skripsi ini.

Bab II : berisi mengenai kekuatan MNCs dalam berinvestasi di Indonesia dilengkapi dengan penjelasan definisi MNCs, bagaimana persebaran MNCs serta kekuatan MNCs sehingga dapat masuk ke Indonesia.

Bab III : berisi mengenai pengaruh MNCs terhadap industri Indonesia dilengkapi dengan definisi dan sejarah penanaman modal di era Belanda, era Jepang dan era saat ini.

Bab IV : berisi mengenai analisa kolaborasi dan relasi MNCs dan Indonesia dalam mengendalikan kaum buruhnya sesuai dengan teori yang digunakan. Dalam bab ini juga akan dijelaskan bagaimana agen MNCs menjadi intelektual organik seperti yang dipaparkan oleh Antonio Gramsci serta bagaimana buruh bisa menjadi objek hegemoni mereka.

Bab V : Kesimpulan